

The Influence Of Human Resource Competence, Community Participation And Internal Control System On Accountability Of Financial Management Of School Operational Assistance Funds (BOS) In State High Schools And Vocational Schools In Pekanbaru City.

Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia, Partisipasi Masyarakat Dan Sistem Pengendalian Internal Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Di SMA Dan SMK Negeri Di Kota Pekanbaru.

Reny Arinda^{1*}, Ruhul Fitrios², Novita Indrawati³

Universitas Riau^{1,2,3}

Renyarinda18@gmail.com¹

**Corresponding Author*

ABSTRACT

This study aims to examine the influence of human resource competence, community participation and internal control systems on the accountability of financial management of school operational assistance funds (BOS) at state high schools/vocational schools in Pekanbaru city. This type of research is quantitative, the data used are primary data. The population in this study was the manager of the school operational assistance fund (BOS) as many as 140 people from 28 state high schools / vocational schools in Pekanbaru city. The sampling technique used is a sampling or census technique. The method of data collection in this study was through a questionnaire. The data analysis method used is to use Partial Least Square (PLS). The results showed that the competence of human resources, community participation and the internal control system influenced the accountability of the management of school operational assistance funds (BOS).

Keywords: Human Resource Competence, Community Participation, Internal Control System, Accountability.

ABSTRACT

Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh kompetensi sumber daya manusia, partisipasi masyarakat dan sistem pengendalian internal terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan dana bantuan operasional sekolah (BOS) di SMA/SMK Negeri di kota pekanbaru. Jenis penelitian ini adalah kuantitatif, data yang digunakan adalah data primer. Populasi dalam penelitian ini adalah pengelola dana bantuan operasional sekolah (BOS) sebanyak 140 orang dari 28 sekolah SMA/SMK Negeri di kota Pekanbaru. Teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah teknik sampling atau sensus. Metode pengumpulan data dalam penelitian ini adalah melalui kuesioner. Metode analisis data yang digunakan adalah menggunakan Partial Least Square (PLS). Hasil penelitian menunjukkan bahwa kompetensi sumber daya manusia, partisipasi masyarakat dan sistem pengendalian internal berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan dana bantuan operasional sekolah (BOS).

Kata Kunci : Kompetensi Sumber Daya Manusia, Partisipasi Masyarakat, Sistem Pengendalian Internal, Akuntabilitas.

1. Pendahuluan

Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) merupakan suatu program pemerintah untuk membantu penyediaan pendanaan biaya operasional non personalia sekolah. (Permendikbud, 2021). Program dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) bertujuan untuk membantu meringankan beban masyarakat terhadap pembiayaan pendidikan dalam rangka wajib belajar 12 (dua belas) tahun. Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) yang digunakan untuk mengurangi biaya penyelenggaraan kegiatan belajar mengajar juga semakin membantu sekolah dalam meningkatkan kualitas sekolahnya, karena dengan dana Bantuan Operasional

Sekolah (BOS), sekolah memiliki dana yang lebih besar untuk membiayai penyelenggaraan pendidikan, perawatan dan menambah fasilitas sarana dan prasarana sekolah. Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) tersebut diterima langsung oleh setiap sekolah dengan cara ditransfer langsung kepada rekening masing-masing sekolah (Kepala Biro Hukum Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, 2021).

Sekolah sebagai suatu entitas harus mampu mengelola dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) sesuai dengan prinsip-prinsip pengelolaan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) yang tercantum dalam Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2021 pasal 2 yaitu prinsip fleksibilitas, efektifitas, efisiensi, akuntabilitas dan transparansi. Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) diharapkan dapat dikelola secara transparan dan akuntabilitas. Pengelolaan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) secara transparan artinya pengelolaan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) harus diketahui oleh stakeholder sekolah. Sedangkan pengelolaan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) secara akuntabilitas artinya dalam pengelolaan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) harus dapat mempertanggungjawabkan penggunaan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) kepada pemerintah dan masyarakat (Sri Rahayuningsih, 2020).

Akuntabilitas merupakan salah satu prinsip tata kelola pemerintahan yang memiliki arti penting untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap serangkaian aktivitas/program yang dirancang dan dijalankan oleh pemerintah bagi kepentingan masyarakat. Akuntabilitas dipahami sebagai kewajiban pihak pemegang amanah (*agent*) untuk memberikan pertanggungjawaban, menyajikan, melaporkan dan mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya kepada pemberi amanah (*principal*) yang memiliki hak dan kewenangan untuk meminta pertanggungjawaban tersebut (Mardiasmo, 2009).

Bantuan Operasional Sekolah (BOS) sangat tepat mendukung Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar 12 Tahun dan diharapkan kebijakan pemerintah tersebut berdampak positif bagi dunia pendidikan dan terutama bagi masyarakat yang kurang mampu. Namun pada pelaksanaan masih mengalami berbagai hambatan baik yang terkait pada aspek kelembagaan maupun pada teknis operasionalnya. Hal ini mengindikasikan bahwa pengelolaan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) masih berjalan belum maksimal yang berujung pada akuntabilitas pengelolaannya juga belum optimal (Masyitah, 2019).

Untuk menghasilkan pengelolaan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) yang efektif, efisien dan dapat dipertanggungjawabkan tentunya dibutuhkan kompetensi sumber daya manusia dalam pengelolaan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS), seperti membuat perencanaan dan pelaporan. Perencanaan menentukan apa yang harus dicapai (penentuan waktu secara kualitatif) dan bila itu harus dicapai, dimana hal itu harus dicapai, bagaimana hal itu harus dicapai siapa yang bertanggung jawab, dan mengapa hal itu harus dicapai (Beishline dalam Manullang, 2012).

Menurut Rudana (2005:6), kompetensi merujuk kepada pengetahuan (*knowledge*), keahlian (*skills*) dan kemampuan (*abilities*), yang dapat didemonstrasikan yang dilakukan dengan standar tertentu. Kompetensi dapat diobservasi, merupakan tindakan perilaku yang memerlukan kombinasi dari ketiga hal ini. Indikatornya kompetensi aparat menurut Rudana (2005) yaitu: pengetahuan, kemampuan untuk meningkatkan pengetahuan dan keahlian teknis, kemampuan mencari solusi, inisiatif dalam bekerja, keramahan dan kesopanan. Ini menunjukkan bahwa kompetensi dalam pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) sangat diperlukan.

Menurut Ade Irawan Koordinator Indonesia Corruption Watch, di Jakarta (2020) mengatakan bahwa penyusunan Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS) yang terjadi di sekolah-sekolah masih bersifat dari atas ke bawah dan tidak melibatkan warga sekolah, orang tua dan masyarakat, sehingga akuntabilitas dan transparansi dalam

pemanfaatan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) tidak terwujud. Mulai dari pengalokasian dana tidak didasarkan pada kebutuhan sekolah tapi pada ketersediaan anggaran. Pada tingkat penyelenggara (Sekolah), tidak ada aturan mengenai mekanisme penyusunan anggaran. Penyebab lain juga terjadi pada partisipasi masyarakat yang kurang karena tidak memiliki akses untuk mendapatkan informasi mengenai anggaran sehingga mereka tidak bisa melakukan pengawasan. Jelas terlihat bahwa di dalam implementasinya, fungsi pengawasan sangat kurang. Tidak ada partisipasi, transparan dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS).

Keterbukaan informasi publik menjadi salah satu indikator kunci dalam implementasinya terkait dengan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS). Akuntabilitas merupakan suatu parameter yang tidak dapat dipisahkan dari kuat atau lemahnya partisipasi masyarakat yang dalam hal ini komite sekolah. Akuntabilitas merupakan landasan bagi proses pengelolaan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) yang harus mempertanggungjawabkan tindakan dan pekerjaannya kepada masyarakat. Akuntabilitas dalam pengelolaan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) menyangkut hak masyarakat untuk memperoleh pertanggung jawaban penyelenggaraan program dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS).

Upaya untuk meminimalisir penyelewengan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) adalah dengan melibatkan masyarakat dalam pengelolaan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS). Sehingga dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) bukan saja menjadi urusan kepala sekolah dan bendahara saja namun juga urusan bersama masyarakat sekolah (Gatra.com, 12 februari, 2020). Untuk dapat mengelola dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) secara partisipatif maka perlu usaha proaktif dari sekolah untuk melibatkan komite sekolah sehingga segala hal yang terkait dengan pengelolaan dana diketahui secara terbuka oleh semua pihak. Strategi yang dilakukan dalam pengelolaan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) antara lain ditunjukkan dengan adanya partisipasi komite sekolah dalam menyusun Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS). Dalam konteks ini sekolah harus melibatkan segenap potensi yang ada seperti guru dan seluruh masyarakat pendidikan untuk memberikan saran dalam penyusunan Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS) yaitu agar semua komponen pendidikan di sekolah memiliki tanggung jawab moral untuk melaksanakan serta mengontrol aplikasi dari rencana yang telah disusun bersama. Sebagai bentuk dari tingkat partisipasi yang tinggi dalam penyusunan Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS) maka Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS) tersebut harus dipajangkan sehingga setiap warga sekolah dapat melihat secara langsung rencana yang telah disusun bersama tersebut.

Melibatkan masyarakat dalam pengelolaan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) diharapkan memberikan dampak terhadap efektifitas tujuan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS). Penelitian tentang melibatkan masyarakat yang memberikan hasil positif pada ini pernah dikaji dalam penelitian *The Effect Of Transparency, Community Participation, And Accountability On Management Of Village Funds In Ponorogo Regency* pada tahun 2019 oleh Khusnatul Zulfa Wafirotn dan Umi Septiastuti dengan hasil penelitian bahwa transparansi, akuntabilitas dan partisipasi masyarakat memberikan dampak positif terhadap pengelolaan dana desa.

Selain mewujudkan peran serta dalam mendukung peningkatan mutu pendidikan, komite sekolah juga memiliki peran sebagai pengawas untuk kesepakatan guna mencapai sekolah yang mandiri dan berprestasi. Komite Sekolah adalah badan mandiri yang mewadahi peran serta masyarakat dalam rangka meningkatkan mutu, pemerataan, dan efisiensi pengelolaan pendidikan di satuan pendidikan, baik pada pendidikan pra sekolah, jalur pendidikan sekolah maupun jalur pendidikan di luar sekolah (Kepmendiknas nomor: 044/U/2002,7). Penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Cahyanto (2014) menguji pengaruh peran komite sekolah terhadap pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS). Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa komite sekolah berpengaruh positif dan signifikan

terhadap Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS). Hal tersebut membuktikan bahwa dengan adanya peran yang tepat dari komite sekolah maka akan memberikan kontrol terhadap pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS).

Setiap pengelolaan keuangan negara termasuk anggaran daerah harus dilakukan dengan tata cara yang telah diberlakukan. Hal ini berarti bahwa setiap instansi pemerintah yang menggunakan anggaran keuangan, termasuk pada instansi/ lembaga pendidikan harus disertai dengan laporan pertanggungjawaban secara akuntabel. Akuntabilitas yang digunakan dalam pengelolaan keuangan publik adalah akuntabilitas finansial. Akuntabilitas finansial merupakan pertanggungjawaban lembaga-lembaga publik untuk menggunakan dana publik (*public money*) secara ekonomis, efisien dan efektif, tidak ada pemborosan dan kebocoran dana, serta korupsi dan kolusi. Hasil dari akuntabilitas finansial yang baik akan digunakan untuk membuat keputusan yang berkaitan dengan mobilisasi dan alokasi sumber daya serta mengevaluasi efisiensi penggunaan dana.

Banyaknya kasus yang terjadi tentang kecurangan pengelolaan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) seperti pungutan liar, penyuapan, dan tidak mematuhi Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS). Maraknya terjadi fraud pada Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) maka diperlukannya sebuah tindakan pencegahan fraud, karena pencegahan terhadap terjadinya suatu perbuatan kecurangan akan lebih mudah daripada mengatasi bila kecurangan telah terjadi. Pencegahan fraud pada umumnya adalah tindakan-tindakan yang dilakukan untuk mencegah perbuatan fraud sebelum terjadi. Menurut (Karyono, 2013), pencegahan fraud merupakan segala upaya untuk menangkal pelaku potensial, mempersempit ruang gerak, dan mengidentifikasi kegiatan yang beresiko tinggi terjadinya kecurangan.

Salah satu faktor yang berpengaruh terhadap pencegahan fraud yaitu dengan adanya pengendalian internal. Menurut (Tuannakotta, 2017), pencegahan fraud dapat dilakukan dengan mengaktifkan pengendalian internal. Apabila pengendalian intern dalam suatu entitas telah efektif, maka dapat memberikan perlindungan bagi entitas terhadap kelemahan manusia serta untuk mengurangi kemungkinan kesalahan dan tindakan yang tidak sesuai dengan aturan. Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) merupakan program pemerintah untuk menyediakan dana nonpersonalia bagi satuan pendidikan dasar, sehingga dalam hal ini perlu adanya sistem pengendalian langsung dari pemerintah untuk mengatur pendistribusian dana yang disebut Sistem Pengendalian Internal Pemerintah atau SPIP. Menurut Peraturan Pemerintah No. 60 tahun 2008 pasal 1 ayat (1), SPIP adalah proses yang integral pada kegiatan dan tindakan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.

Penelitian ini merujuk pada penelitian (Pura & Sufiati, 2014) yang menguji pengaruh internal control terhadap pencegahan fraud atas pengelolaan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS). Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa pengendalian internal berpengaruh positif dan signifikan terhadap pencegahan fraud atas pengelolaan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS), artinya bahwa dengan adanya pengendalian internal maka akan semakin baik pencegahan fraud sehingga akan mengurangi kecenderungan pengelola dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) melakukan fraud. Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Ariastini et al., 2017) yang menguji pengaruh SPIP terhadap pencegahan fraud pengelolaan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) yang menunjukkan bahwa SPIP berpengaruh positif dan signifikan terhadap pencegahan fraud atas pengelolaan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS). Beberapa penelitian terdahulu lainnya yang menguji pengaruh pengendalian internal terhadap pencegahan fraud juga telah dilakukan oleh Joseph et al., (2014), Yuniarti (2017), dan Muliawan et al., (2017) yang menemukan bahwa pengendalian intern berpengaruh signifikan terhadap pencegahan fraud. Hal tersebut

menunjukkan jika suatu organisasi yang memiliki sistem pengendalian internal yang lemah, maka cenderung akan meningkatkan peluang terjadinya kecurangan di dalam organisasi tersebut. Artinya semakin baik sistem pengendalian internal, maka akan semakin rendah tingkat terjadinya fraud.

Dari paparan diatas dapat disimpulkan bahwa masih banyak sekolah dalam mengelola keuangan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) tidak bisa mempertanggungjawabkan dengan baik, tidak transparan, masih kurangnya partisipasi dan pengawasan intern yang diakibatkan masih rendahnya pengetahuan atau kompetensi dari pengelola Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) tersebut. Pengelolaan keuangan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) yang dilakukan oleh pihak sekolah diharapkan mampu menyajikan laporan keuangan dengan baik dan dapat tepat waktu didukung dengan sikap yang jujur dan dapat di pertanggungjawabkan atau akuntabel dan juga transparan agar tidak terjadi penyelewengan anggaran. Oleh karena itu, sekolah dituntut untuk dapat menerapkan prinsip akuntabilitas dan transparansi didalam laporan keuangan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) tersebut.

Berdasarkan uraian diatas maka Penulis tertarik untuk melakukan Penelitian Tentang “Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia, Partisipasi Masyarakat dan Sistem Pengendalian Internal Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Di SMA dan SMK Negeri Di Kota Pekanbaru.” Dengan rumusan masalah sebagai berikut Apakah kompetensi sumber daya manusia berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) di SMA dan SMK Negeri di kota Pekanbaru? Apakah partisipasi masyarakat berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) di SMA dan SMK Negeri di kota Pekanbaru? Apakah sistem pengendalian internal berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) di SMA dan SMK Negeri di kota Pekanbaru?

2. Tinjauan Pustaka

Teori Stewardship

Stewardship theory dibangun di atas asumsi filosofis mengenai sifat manusia yakni bahwa manusia pada hakekatnya dapat dipercaya, memandang manajemen sebagai dapat dipercaya untuk bertindak dengan sebaik-baiknya bagi kepentingan publik maupun stakeholder (Kaihatu, 2006). Menurut (Helena dan Therese, 2005) di dalam teori *stewardship*, manajer akan melakukan upaya demi mendapatkan kepercayaan publik. Hal ini didasari pada prinsip bahwa manajer memiliki tanggung jawab yang besar untuk mengelola sumber daya yang ada dengan cara yang bijak untuk kepentingan masyarakat luas. Para manajer tidak akan bertindak untuk kepentingannya sendiri, akan tetapi bertindak untuk kepentingan semua pihak, dan mereka (para manajer) percaya, apabila mereka telah bertindak untuk kepentingan yang lebih luas, maka secara pribadi kebutuhan mereka pun telah terpenuhi.

Good Corporate Governance

Stewardship theory memandang manajemen sebagai dapat dipercaya untuk bertindak dengan sebaik-baiknya bagi kepentingan publik maupun stakeholder (Kaihatu, 2006). *Good corporate governance* (GCG) secara definitif merupakan sistem yang mengatur dan mengendalikan perusahaan yang menciptakan nilai tambah (*value added*) untuk semua *stakeholder* (Monks, 2003). Ada empat komponen utama yang diperlukan dalam konsep *good corporate governance*, (Kaen, 2003; Shaw, 2003) yaitu *fairness*, *transparency*, *accountability*, dan *responsibility*. Keempat komponen tersebut penting karena penerapan prinsip *good corporate governance* secara konsisten terbukti dapat meningkatkan kualitas laporan keuangan dan juga dapat menjadi penghambat aktivitas rekayasa kinerja yang mengakibatkan laporan

keuangan tidak menggambarkan nilai fundamental perusahaan.

Good School Governance

Good School Governance (GSG) adalah istilah lain dari *Good Corporate Governance* (GCG) yang digunakan untuk instansi pendidikan khususnya sekolah. *Good School Governance* (GSG) adalah sebuah perangkat pendukung untuk membentuk sebuah sekolah dengan tata kelola yang baik. Salah satu bentuk perwujudan dari tata kelola sekolah yang baik adalah dengan dibuatnya konsep Manajemen Berbasis Sekolah (MBS). Manajemen Berbasis Sekolah adalah model pengelolaan sekolah berdasarkan kekhasan, keleluasaan, kemampuan, dan kebutuhan sekolah yang dilakukan secara partisipatif, transparan, akuntabel, berwawasan ke depan, tegas dalam penegakan hukum, adil, egaliter, prediktif, peka terhadap aspirasi stakeholder, pasti dalam jaminan mutu, profesional, efisien dan efektif, dalam rangka peningkatan mutu (Slamet, 2006).

Teori Efektivitas

Menurut (Subagyo, 2000) efektivitas adalah kesesuaian antara output dengan tujuan yang ditetapkan. Hal ini sesuai dengan pendapat H. Emerson yang dikutip Soewarno Handyaningrat S. (1994:16) yang menyatakan bahwa "Efektivitas adalah pengukuran dalam arti tercapainya tujuan yang telah ditentukan sebelumnya". Menurut Richard Steer dalam Halim (2001), efektivitas harus dinilai atas dasar tujuan yang bisa dilaksanakan, bukan atas dasar konsep tujuan yang maksimum.

Dana Bantuan Sekolah

Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) merupakan suatu program pemerintah untuk membantu penyediaan pendanaan biaya operasional non personalia sekolah (Permendikbud, 2021). Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) adalah dana yang dialokasikan untuk membantu kebutuhan belanja operasional seluruh peserta didik pada satuan pendidikan dasar dan menengah (Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, Nomor 6 Tahun 2021). Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) adalah program Pemerintah Pusat untuk penyediaan pendanaan biaya operasi nonpersonalia bagi bantuan Pendidikan dasar, satuan Pendidikan khusus dan satuan Pendidikan menengah yang bersumber dari dana alokasi khusus nonfisik (Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2020).

Akuntabilitas

akuntabilitas adalah kondisi seseorang yang dinilai oleh orang lain karena kualitas performasinya dalam menyelesaikan tugas untuk mencapai tujuan yang menjadi tanggung jawabnya. Akuntabilitas yang tinggi dapat di capai dengan pengelolaan sumber daya sekolah secara efektif dan efisien. Akuntabilitas di dalam manajemen keuangan berarti penggunaan uang sekolah dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan perencanaan yang telah ditetapkan. Pertanggungjawaban dilakukan kepada orang tua, masyarakat dan pemerintah ataupun pertanggungjawaban pelayan publik.

Tujuan akuntabilitas adalah agar terciptanya kepercayaan publik. Kepercayaan publik yang tinggi akan sekolah dapat mendorong partisipasi yang lebih tinggi pula terhadap pengelolaan manajemen sekolah. Mekanisme akuntabilitas meliputi beberapa aspek yaitu siapa yang harus melakukan akuntabilitas, kepada siapa akuntabilitas ini dilakukan, untuk apa akuntabilitas dilakukan, dan bagaimana akuntabilitas ini dilaksanakan. Mekanisme akuntabilitas ini sangat bergantung pada kondisi dan sistem yang ada pada masing-masing (Ita Rakhmawati, 2018).

Kopetensi Sumber Daya Manusia

Kompetensi adalah suatu kemampuan untuk melaksanakan atau melakukan suatu pekerjaan atau tugas yang dilandasi atas keterampilan dan pengetahuan serta didukung oleh sikap kerja yang dituntut oleh pekerjaan tersebut. Wibowo (2016). Menurut (Havesi, 2005), kompetensi merupakan seseorang yang memiliki karakteristik berupa pengetahuan (knowledge), kemampuan (ability), dan keterampilan (skill) yang melaksanakan dalam suatu pekerjaan. Tingkatan kompetensi bisa dinilai berdasarkan latar belakang pendidikan yang dimiliki, pelatihan, serta ketrampilan yang dimiliki. Pada dasarnya banyak indikator yang mempengaruhi kompetensi karyawan suatu perusahaan, indikator kompetensi menurut (Ruky alam Fadillah, dkk, 2017), yaitu: Karakter pribadi (*traits*), Konsep diri (*self concept*), Pengetahuan (*knowledge*), Keterampilan (*skill*), Motivasi kerja (*motives*).

Partisipasi Masyarakat

(Tilaar, 2009) mengungkapkan partisipasi adalah sebagai wujud dari keinginan untuk mengembangkan demokrasi melalui proses desentralisasi dimanadiupayakan antara lain perlunya perencanaan dari bawah (bottom-up) dengan mengikutsertakan masyarakat dalam proses perencanaan dan pembangunan masyarakatnya. Partisipasi masyarakat merupakan suatu alat pembelajaran yang dapat memberikan perubahan kekuatan sosial melalui suatu organisasi masyarakat (Rustiadi et al., 2009). Partisipatif, berarti pelayanan publik mendorong dan membutuhkan peran aktif masyarakat mulai dari tahap awal perencanaan hingga evaluasi atau kontrol pelaksanaan pelayanan publik (Wibowo dan purnomo 2007). Partisipasi masyarakat adalah masyarakat terlibat ikut serta pada proses pengidentifikasian permasalahan dan potensi yang ada pada masyarakat, memilih, dan mengambil mengenai solusi paling alternatif dalam menangani permasalahan, melaksanakan upaya memecahkan permasalahan serta terlibat dalam proses evaluasi perubahan yang terjadi (Muslimin et al., 2012).

Sistem Pengendalian Internal

pengendalian internal menurut (COSO, 2013) adalah suatu proses yang dipengaruhi dewan direksi, manajemen dan personil lainnya, pada suatu entitas, didesain untuk menyediakan penjaminan yang bertanggung jawab mengenai pencapaian tujuan hubungannya dengan operasional, laporan dan pencapaian tujuan. Adapun definisi dari Sistem Pengendalian Internal menurut Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 sebagai berikut: "Sistem Pengendalian Internal adalah proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. Sistem Pengendalian Internal Pemerintah, yang kemudian disingkat SPIP adalah Sistem Pengendalian Internal yang diselenggarakan secara menyeluruh di lingkungan pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Pengendalian intern sebagaimana didefinisikan oleh (COSO, 2013), terdiri atas lima komponen yang saling terkait, yaitu: Lingkungan Pengendalian, Penilaian Risiko, Aktivitas Pengendalian, Informasi dan komunikasi dalam pengendalian intern, Pemantauan.

Kerangka Pemikiran dan Hipotesis

Kerangka penelitian merupakan alur yang menggambarkan proses berpikir yang dituangkan dalam bentuk hubungan antar variabel yang diteliti dan cara pengukurannya serta hasil penelitian yang diharapkan. Tujuan utama dari kerangka penelitian adalah memberikan arah dan fokus penelitian secara efektif yang didasarkan pada hasil kajian teoritik dan hasil-

hasil penelitian terdahulu. Berdasarkan uraian sebelumnya, maka kerangka pemikirannya adalah :

Pengaruh Kompetensi Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS)

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah Reguler pada pasal 18 dikemukakan bahwa pengelolaan dan pelaporan penggunaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Reguler dilakukan oleh sekolah dan Pemerintah Daerah. Dalam pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Reguler kepala sekolah membentuk tim dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS). Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2021 pasal 19 juga menjelaskan dalam pengelolaan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) reguler kepala sekolah membutuhkan kompetensi antara lain membuat perencanaan penggunaan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS), melakukan pemutahiran dana Dapodik dan membuat laporan, pelaporan Kompetensi adalah kemampuan sumber daya manusia untuk melaksanakan tugas dan tanggungjawab yang diberikan kepadanya dengan bekal pendidikan, pelatihan, dan pengalaman yang cukup memadai (Abdul, 2010). Hasil penelitian Periansya & Sopiyan AR, (2020) menyatakan bahwa sumber daya manusia berpengaruh positif terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. Didukung penelitian (Umaira & Adnan, 2019) , Sapartiningsih, dkk (2018), menunjukkan bahwa sumber daya manusia berpengaruh positif terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. Dan penelitian dari (Ismail et al., 2016) yang menyatakan bahwa kompetensi sumber daya manusia sangat berpengaruh terhadap pengelolaan dana desa. Aparatur desa yang kompeten dapat lebih bertanggungjawab dalam melakukan aktivitas dan tugas. Kualitas sumber daya manusia yang semakin kompeten, maka akan semakin baik pula akuntabilitas pengelolaan dana desa. Berdasarkan hal tersebut maka dapat diajukan hipotesis. H_1 : Terdapat pengaruh kompetensi sumber daya manusia terhadap akuntabilitas pengelolaan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS)

Pengaruh Partisipasi Masyarakat Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Bantuan Operasional (BOS)

Berdasarkan kajian Bank Dunia (2014) disimpulkan bahwa pemberdayaan pemangku kepentingan (terutama sekolah dan masyarakat) untuk membuat keputusan sendiri dalam upaya untuk memperbaiki hasil-hasil pendidikan sangatlah penting. Jika melihat konsep partisipasi, maka akan terlihat adanya pergeseran dari sesuatu yang sifatnya turunan dari atas yang mendominasi pelaksanaan kebijakan, menjadi inisiatif yang lebih memperhatikan kepentingan pelaksana, dalam hal ini sekolah dan masyarakat (Storey, 1999). Komite Sekolah adalah lembaga mandiri yang beranggotakan orang tua atau wali peserta didik, komunitas sekolah, serta tokoh masyarakat yang peduli Pendidikan

Penelitian Yulia Indahri, 2019 menyatakan bahwa Partisipasi masyarakat, terutama jika menyangkut pendanaan, tidak berarti tanpa pengawasan. Harus ada kepastian transparansi dan akuntabilitas dari pemanfaatan dana yang tetap dilaporkan ke masyarakat dan tidak bersifat memaksa. Walaupun berbeda objek pendanaannya pada penelitian Periansya & Sopiyan AR, (2020) menyatakan bahwa partisipasi masyarakat berpengaruh positif terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa, semakin meningkat partisipasi masyarakat dalam hal keuangan desa, maka akan meningkatkan akuntabilitas pengelolaan dana desa. Hasil penelitian ini didukung dari penelitian Umaira & Adnan, (2019), Mada et al., (2017) yang menyatakan bahwa partisipasi masyarakat berpengaruh positif terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. Masyarakat yang diberikan pelayanan, seharusnya harus ikut serta dalam menyelenggaraan pengelolaan dana desa yang lebih baik.

H₂ : Terdapat pengaruh partisipasi masyarakat terhadap akuntabilitas pengelolaan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS)

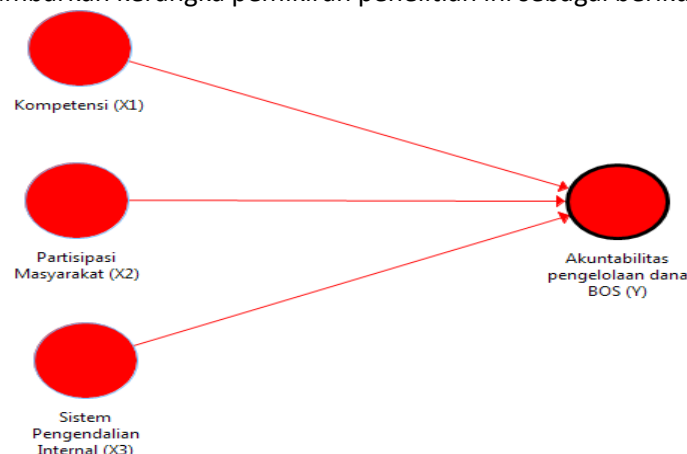
Pengaruh Sistem Pengendalian Internal Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS)

Sistem Pengendalian Internal merupakan struktur organisasi, metode dan ukuran-ukuran yang dikoordinasikan untuk menjaga asset organisasi, mengecek ketelitian dan keandalan data akuntansi, mendorong efisiensi dan mendorong dipatuhinya kebijakan Mulyadi (2017). Semakin baik Sistem Pengendalian internal maka dapat meningkatkan akuntabilitas dalam pengelolaan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS). Level ini dapat dikategorikan sebagai bagian *Accounting Infrastructure, Accounting Culture, dan Accounting Practice* berdasarkan Accountability Framework yang dikembangkan oleh (Iyoha & D, 2009). Sistem pengendalian internal merupakan salah satu cara untuk meminimalisir terjadinya asimetri informasi yaitu dengan cara monitoring cost.

Pemerintah pusat maupun pemerintah daerah berkewajiban untuk mengembangkan dan memanfaatkan Sistem Pengendalian Internal, sehingga dapat meningkatkan kemampuan dalam mengelola keuangan dan menyalurkan informasi keuangan kepada pelayan publik. Selain itu, dengan memanfaatkan Sistem Pengendalian Internal dengan baik nantinya akan meningkatkan akuntabilitas dalam pengelolaan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dengan cara proses penyusunan dan pelaporan keuangan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) yang lebih cepat, akurat, dan tepat sehingga mengurangi kesalahan yang terjadi. Penelitian yang dilakukan oleh Y.P. Hutomo, D. Damayanti Tentang Pengaruh Sistem Pengendalianintern Pemerintahan Terhadap Keterandalan laporan Keuangan Dana Bantuan operasional Sekolah (BOS) Pada UPTP XXXIII Ciseeng Kabupaten bogor memperlihatkan hasil bahwa SPIP berpengaruh positif secara simultan sebesar 86,3 % sedangkan secara parsial lingkungan pengendalian, penilaian resiko, aktivitas pengendalian informasi dan komunikasi dan pemantauan berpengaruh positif terhadap keterandalan laporan keuangan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS).

H₃ : Terdapat pengaruh sistem pengendalian intern terhadap akuntabilitas pengelolaan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS)

Dapat digambarkan kerangka pemikiran penelitian ini sebagai berikut:



Gambar 1. Kerangka Pemikiran

3. Metode Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian kuantitatif, Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui faktor kompetensi sumberdaya manusia, partisipasi masyarakat, sistem pengendalian internal dan akuntabilitas yang akan dijelaskan hubungannya. Adapun tujuan

untuk menyajikan gambaran secara terstruktur dan akurat mengenai fakta-fakta serta hubungan antar variabel yang diteliti.

Pada penelitian ini metode yang digunakan adalah pendekatan deskriptif. Tujuan dari penelitian deskriptif ini adalah untuk membuat deskripsi, gambaran atau lukisan secara sistematis, factual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antar fenomena yang diselidiki. Pada penelitian kali ini gunanya untuk menganalisis tentang kompetensi, partisipasi masyarakat, sistem pengendalian internal dan akuntabilitas pengelolaan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) di SMA dan SMK Negeri yang ada di Kota Pekanbaru. Pengumpulan data yang dilakukan peneliti dengan menyebarkan Kuesioner yang mana penelitian ini dilakukan di SMA dan SMK Negeri di kota Pekanbaru. Waktu penelitian dilaksanakan mulai bulan 1 Desember 2021 sampai 30 Januari 2022.

Alat analisis data dalam penelitian ini menggunakan *Structural Equation Modeling-Partial Least Square (SEM-PLS)* dengan menggunakan *software WarpPLS* versi 6.0. *Structural Equation Modeling (SEM)* adalah suatu teknik statistik yang mampu menganalisis pola hubungan antara konstruk laten dan indikatornya, konstruk laten yang satu dengan lainnya, serta kesalahan pengukuran secara langsung.

Statistik Deskriptif

Statistik deskriptif adalah statistik yang digunakan untuk menganalisis data dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan sampel data yang telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa bermaksud membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum atau generalisasi (Sugiyono, 2016).

Pengukuran Model atau *Outer Model*

Pengukuran model atau outer model (sering juga disebut *outer relation* atau *measurement model*) mendefinisikan bagaimana setiap blok indikator berhubungan dengan variabel latennya. Model pengukuran (*outer model*) digunakan untuk menguji validitas konstruk dan reliabilitas instrument (Ghozali, 2013). Dengan menggunakan WarpPLS ada tiga kriteria untuk melihat untuk melihat outer model yaitu *Convergen Validity*, *Discriminant Validity*, dan *Composite Reliability*.

Uji Validitas

Validitas atau kesahihan suatu instrument adalah ukuran seberapa tepat instrumen itu menghasilkan data yang sesuai dengan ukuran yang sesungguhnya yang ingin di ukur. Outer model dengan indikator reflektif dengan menguji validitas konvergen (*Convergen validity*) dan validitas diskriminan (*Discriminant Validity*) (Ghozali, 2013)

Menurut Hair dkk dalam (Solihin dan Ratmono, 2013) syarat validitas konvergen untuk konstruk reflektif yaitu :

1. Outer loading harus di atas 0,70
2. P signifikan (<0,50)

Dalam beberapa kasus sering syarat loading di atas 0,70 sering tidak terpenuhi khususnya untuk kuesioner yang baru dikembangkan. Oleh karena itu, loading 0,40-0,70 harus tetap dipertimbangkan untuk tetap dipertahankan (Solihin dan Ratmono, 2013). Indikator dibawah 0,40 harus dihapus dari model. Selain melihat dengan loading factor, untuk menguji validitas convergent dapat juga dengan melihat nilai AVE. Apabila nilai AVE yang dihasilkan semua konstruk lebih dari 0,50 maka konstruk memenuhi persyaratan validitas convergent (Ghozali, 2013).

Uji Reliabilitas

Uji reliabilitas adalah alat untuk mengukur suatu kuesioner yang merupakan indikator

dari variabel atau konstruk, uji reliabilitas dilakukan setelah uji validitas dan hanya pertanyaan-pertanyaan yang dianggap valid. Dalam PLS-SEM dengan menggunakan program *WarpPLS 6.0*, untuk mengukur reabilitas suatu konstruk dengan indikator refleksif dapat dilakukan dengan dua cara yaitu dengan melihat nilai *Cronbach's alpha* dan *composite reliability*. Apabila nilai *cronbach's alpha* dan *composite reliability* yang dihasilkan $> 0,70$ (*comfirmatory research*) maka semua konstruk dapat dikatakan reliabel.

Model Struktural atau Inner Model

Model struktural atau inner model menunjukkan hubungan atau kekuatan estimasi antar variabel laten atau konstruk berdasarkan pada substantive theory.

a. *R-Square*

Dalam menilai model struktural terlebih dahulu menilai *R-Square* untuk setiap variabel laten endogen sebagai kekuatan prediksi dari model struktural. Nilai *RSquare* 0,75, 0,50 dan 0,25 dapat disimpulkan bahwa model kuat, moderate dan lemah (Ghozali, 2013).

b. *F-Square*

Uji *F-square* ini dilakukan untuk mengetahui kebaikan model. Nilai *F-square* sebesar 0,02, 0,15 dan 0,35 dapat diinterpretasikan apakah prediktor variabel laten mempunyai pengaruh yang lemah, medium, atau besar pada tingkat struktural (Ghozali, 2013).

c. *Estimate For Path Coefficients*

Uji selanjutnya adalah melihat signifikansi pengaruh antar variabel dengan melihat nilai koefisien parameter dan nilai signifikansi T statistik yaitu melalui metode *bootstrapping* (Ghozali, 2013).

4. Hasil dan Pembahasan

Tabel 1. Tingkat Pengembalian Kuesioner

Kuesioner	Jumlah (orang)	Persentase (%)
Kuesioner yang disebar	140	100%
Kuesioner yang kembali	98	70%
Kuesioner yang tidak kembali	42	30%
Kuesioner yang tidak lengkap	0	0%
Kuesioner yang dapat digunakan	0	0%

Sumber : Data olahan, 2022.

Berdasarkan tabel 1 dapat dijelaskan bahwa penelitian ini telah menyebarkan 140 kuesioner kepada kepala sekolah, bendahara, guru dan masyarakat (komite) yang ada di SMA/SMK Negeri di Kota Pekanbaru, penyebaran kuesioner ini dilakukan pada tingkat pengembalian sebesar persentase 70%.

Deskripsi data yang akan disampaikan berikut ini untuk memberikan gambaran secara umum mengenai penyebaran data yang telah dilakukan dilapangan. Sampel dalam penelitian ini ada 98 orang responden. Tabel dibawah ini akan menampilkan hasil analisis deskriptif dari masing-masing variabel:

Tabel 2. Tanggapan Responden tentang Akuntabilitas Pengelolaan Dana BOS

		Statistics			
		Akuntabilitas	Kompetensi	Partisipasi	SPI
N	Valid	98	98	98	98
	Missing	0	0	0	0
Mean		20.4898	20.6429	20.6633	20.3980
Median		20.0000	20.0000	20.0000	20.0000
Mode		20.00	20.00	20.00	20.00
Std. Deviation		2.66804	2.92254	2.80259	2.89948
Variance		7.118	8.541	7.855	8.407
Minimum		15.00	15.00	15.00	15.00
Maximum		25.00	25.00	25.00	25.00
Sum		2008.00	2023.00	2025.00	1999.00

Sumber : Data Olahan, 2022

Berdasarkan tabel 2 menunjukkan bahwa rata-rata (mean) responden memberikan tanggapan kompetensi SDM 20.6429, partisipasi masyarakat 20.6633, sistem pengendalian internal 20.3980 dan akuntabilitas pengelola dana BOS nila rata-ratanya sebesar 20.4898. Artinya pengelolaan dana BOS sudah berjalan dengan baik karena responden banyak menjawab pernyataan tentang kompetensi SDM, partisipasi masyarakat, sistem pengendalian internal dan akuntabilitas pengelolaan dana BOS dengan jawaban dengan bobot jawaban 4 - 5.

Hasil Pengujian Kualitas Data

Hasil Pengujian Validitas dan Reliabilitas Data Convergen Validity

Suatu indikator dinyatakan memenuhi convergent validity dalam kategori baik apabila nilai outer loading > 0,7.

Tabel 3. Outer Loading

	Akuntabilitas (Y)	Kompetensi (X1)	Partisipasi (X2)	Sistem pengendalian (X3)
x1.1		0.876		
x1.2		0.866		
x1.3		0.810		
x1.4		0.819		
x1.5		0.881		
x2.1			0.862	
x2.2			0.849	
x2.3			0.807	
x2.4			0.812	
x2.5			0.794	
x3.1				0.806
x3.2				0.765
x3.3				0.857
x3.4				0.922
x3.5				0.901
y.1	0.835			
y.2	0.699			
y.3	0.659			
y.4	0.869			
y.5	0.826			

Sumber: Data Olahan (2022)

Berdasarkan sajian data dalam tabel di atas, diketahui bahwa masing-masing indikator variabel penelitian kompetensi, partisipasi masyarakat, sistem pengendalian internal dan akuntabilitas pengelolaan dana BOS banyak yang memiliki nilai outer loading $> 0,7$. Menurut Ghazali (2015: 39) nilai outer loading antara 0,5-0,6 sudah dianggap cukup untuk memenuhi syarat convergent validity. Data di atas menunjukkan tidak ada indikator variabel yang nilai outer loadingnya di bawah 0,5, sehingga semua indikator dinyatakan layak atau valid untuk digunakan penelitian dan dapat digunakan untuk analisis lebih lanjut.

Discriminant Validity

Uji discriminant validity menggunakan nilai cross loading. Berdasarkan hasil yang diperoleh tersebut, dapat dinyatakan bahwa indikator-indikator yang digunakan dalam penelitian ini telah memiliki discriminant validity yang baik dalam menyusun variabelnya masing-masing. Selain nilai cross loading, discriminant validity juga dapat diketahui melalui average variant extracted (AVE).

Tabel 4. Average Variant Extracted (AVE)

	AVE
Akuntabilitas (Y)	0.611
Kompetensi (X1)	0.724
Partisipasi (X2)	0.681
Sistem pengendalian (X3)	0.726

Sumber: Data Olahan, 2022

Berdasarkan sajian data dalam table 4.4 di atas, diketahui bahwa nilai AVE variabel kompetensi, partisipasi masyarakat, sistem pengendalian internal dan akuntabilitas pengelolaan dana BOS $> 0,5$. Dengan demikian dapat dinyatakan bahwa setiap variabel telah memiliki *discriminant validity* yang baik

Composite Reliability

Suatu variabel dapat dinyatakan memenuhi composite reliability apabila memiliki nilai composite reliability $> 0,6$.

Tabel 5. Composite Reliability

	Composite Reliability
Akuntabilitas (Y)	0.886
Kompetensi (X1)	0.929
Partisipasi (X2)	0.914
Sistem pengendalian (X3)	0.930

Sumber : Data Olahan, 2022

Berdasarkan sajian data pada tabel di atas, dapat diketahui bahwa nilai composite reliability semua variabel penelitian $> 0,7$. Hasil ini menunjukkan bahwa masing-masing variabel telah memenuhi *composite reliability* sehingga dapat disimpulkan bahwa keseluruhan variabel memiliki tingkat realibilitas yang tinggi.

Cronbach Alpha

Uji realibilitas dengan composite reability di atas dapat diperkuat dengan menggunakan nilai cronbach alpha.

Tabel 6. Cronbach Alpha

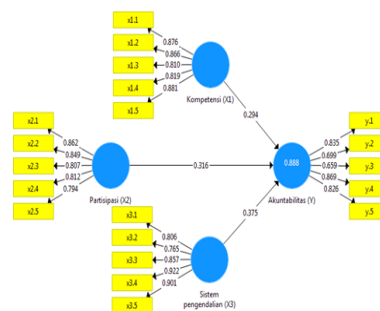
	Cronbachs Alpha
Akuntabilitas (Y)	0.847
Kompetensi (X1)	0.906
Partisipasi (X2)	0.884
Sistem pengendalian (X3)	0.904

Sumber: Data Olahan, 2022

berdasarkan sajian data di atas pada tabel di atas, dapat diketahui bahwa nilai cronbach alpha dari masing-masing variabel penelitian $>0,7$. Dengan demikian hasil ini dapat menunjukkan bahwa masing-masing variabel penelitian telah memenuhi persyaratan nilai cronbach alpha, sehingga dapat disimpulkan bahwa keseluruhan variabel memiliki tingkat reliabilitas yang tinggi.

Skema Model Partial Least Square (PLS)

Berikut ini adalah skema model program SEM PLS yang diujikan:

**Gambar 2. Inner Model**

Pengujian Inner Model

Uji Kebaikan Model (Goodness of Fit)

Berdasarkan pengolahan data yang telah dilakukan dengan menggunakan program SEMPLS 2.0, diperoleh nilai R-Square sebagai berikut:

Tabel 7. R-Square Variabel

	R Square	Adj R Square
Akuntabilitas (Y)	0.888	0.884

Sumber : Data Olahan, 2022

Berdasarkan nilai R-square pada tabel di atas diketahui bahwa nilai R^2 atau pengaruh antara kompetensi, partisipasi masyarakat dan sistem pengendalian internal terhadap akuntabilitas pengelolaan dana BOS sebesar 0,888. Jadi kemampuan dari variabel kompetensi, partisipasi masyarakat dan sistem pengendalian internal dalam mempengaruhi akuntabilitas pengelolaan dana BOS sebesar 88,8%. Sedangkan sisanya 11,2% dipengaruhi variabel lain di luar penelitian ini.

Tabel 8. Nilai F Square

	Akuntabilitas (Y)
Akuntabilitas (Y)	
Kompetensi (X1)	0.114
Partisipasi (X2)	0.138
Sistem pengendalian (X3)	0.283

Sumber : Data Olahan, 2022

Berdasarkan tabel di atas maka dapat dinyatakan sebagai berikut:

1. Pengaruh kompetensi terhadap akuntabilitas pengelolaan dana bos memiliki F2 (0,114) kuat.

2. Pengaruh partisipasi masyarakat terhadap akuntabilitas pengelolaan danabos memiliki F2 (0,138) kuat.
3. Pengaruh sistem pengendalian internal terhadap akuntabilitas pengelolaan dana bos memiliki F2 (0,283) sangat kuat.

Uji hipotesis pada penelitian ini dilakukan dengan melihat nilai T-Statistics dan nilai P-Values. Berikut ini adalah hasil uji hipotesis yang diperoleh dalam penelitian ini melalui inner model:

Tabel 9. Nilai Path Coeficient

	Original Sample (O)	Sample Mean (M)	Standard Deviation (STDEV)	T Statistics (O/STDEV)	P Values
Kompetensi (X1) -> Akuntabilitas (Y)	0.294	0.281	0.135	2.179	0.030
Partisipasi (X2) -> Akuntabilitas (Y)	0.316	0.310	0.123	2.558	0.011
Sistem pengendalian (X3) -> Akuntabilitas (Y)	0.375	0.393	0.133	2.809	0.005

Sumber : Data Olahan, 2022

Berdasarkan sajian data pada tabel 4.9 di atas, dapat diketahui bahwa dari 3 hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini, semua hipotesis yang dapat diterima karena masing-masing pengaruh yang ditunjukkan memiliki nilai t-hitung > t-tabel.

Berdasarkan tabel 6 dapat dijelaskan sebagai berikut :

- Hipotesis pertama menguji apakah kompetensi berpengaruh positif terhadap akuntabilitas pengelolaan dana BOS pada SMA dan SMK Negeri Pekanbaru. Hasil pengujian menunjukkan nilai koefisien parameter kompetensi terhadap akuntabilitas pengelolaan dana BOS dengan t-statistik 2,179, dan p-value 0,030. Dari hasil ini dinyatakan t-statistik berpengaruh signifikan. Karena p-value 0,03 lebih kecil dari 0,05 maka H_0 ditolak, H_a diterima, dan hipotesis penelitian pertama diterima. Hal tersebut membuktikan bahwa kompetensi memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan dana BOS pada SMA dan SMK Negeri Pekanbaru.
- Hipotesis kedua menguji apakah partisipasi masyarakat berpengaruh positif terhadap akuntabilitas pengelolaan dana BOS pada SMA dan SMK Negeri Pekanbaru. Hasil pengujian menunjukkan nilai koefisien parameter partisipasi masyarakat terhadap akuntabilitas pengelolaan dana BOS pada SMA dan SMK Negeri Pekanbaru t-statistik 2,558 dan p-value 0,011. Dari hasil ini dinyatakan t-statistik tidak signifikan. Karena 2,558 dengan pvalue < 0,05 maka H_0 ditolak, H_a diterima dan hipotesis penelitian kedua diterima. Hal tersebut membuktikan bahwa partisipasi masyarakat memiliki pengaruh positif tetapi dan signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan dana BOS pada SMA dan SMK Negeri Pekanbaru.
- Hipotesis ketiga menguji apakah sistem pengendalian internal berpengaruh positif terhadap akuntabilitas pengelolaan dana BOS pada SMA dan SMK Negeri Pekanbaru. Hasil pengujian menunjukkan nilai koefisien parameter sistem pengendalian internal terhadap akuntabilitas pengelolaan dana BOS t statistik 2,809 dan p-value 0,005. Dari hasil ini dinyatakan t-statistik signifikan. Karena t 2,809 dengan p-value < 0,05 maka H_0 ditolak, H_a diterima dan hipotesis penelitian ketiga diterima. Hal tersebut membuktikan bahwa sistem pengendalian internal memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap sistem pengendalian internal.

5. Penutup

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis yang sudah dilakukan sebelumnya tentang pengaruh kompetensi, partisipasi masyarakat dan sistem pengendalian internal terhadap akuntabilitas pengelolaan dana BOS pada SMA dan SMK Negeri di Pekanbaru, diperoleh hasil kesimpulan sebagai berikut yaitu kompetensi berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan dana bantuan operasional sekolah (BOS), Partisipasi masyarakat berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan dana bantuan operasional sekolah (BOS), sistem pengendalian internal berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan dana bantuan operasional sekolah (BOS).

Daftar Pustaka

- Alam, Nur Indah. (2020). Pengaruh Pemberdayaan Karyawan dan Kompensasi terhadap Kinerja Karyawan pada PT. XL Axiata Tbk Cabang Makassar.
- Abdul, K. (2010). Pengaruh Kualitas Sumber Daya Manusia terhadap Pelaksanaan Sistem Pengelolaan Intern pada PT. AVIA AVIAN.
- Agoes, Sukrisno. (2012). *Auditing: Petunjuk Praktis Pemeriksaan Akuntan oleh Akuntan Publik*. Jilid 1, Edisi 4, Jakarta: Salemba empat
- Anggaraini Ristya, (2013). Transparansi, Partisipasi dan Akuntabilitas pengelolaan Anggaran Dana BOS dalam Program RKAS, 1(2)
- Al-Samarrai, S., Fasih, T., Hasan, A. & Syukriyah, D. (2014). *Pengkajian Peran Program Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dalam Memperbaiki Hasil-Hasil Pendidikan di Indonesia*. Jakarta : Bank Dunia
- Ariastini, Ni Kadek Dwi. (2017). Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia, Sistem Pengendalian Internal Pemerintah, Proactive Fraud Audit, dan Whistleblowing System Terhadap Pencegahan Fraud Pada Pengelolaan Dana BOS Se-Kabupaten Klungkung. *Jurnal Akuntansi Program S1*, 8(2)
- Bilson Simamora. (2005). *Analisis Multivariat Pemasaran*. Jakarta : Gramedia Pustaka Utama.
- Committee of Sponsoring Organization (COSO) of The Treadway Commission. (2013). Internal Control – Integrated Framework: Executive Summary. COSO. Mei 2013.
- Cahyanto, Aprizal Happy. (2014). Pengaruh Peran Komite Dan Pengawas Sekolah Terhadap Pengelolaan Dana Bos Di SMPN 2 Geger Kab. Madiun. *Forum Ilmiah Pendidikan Akuntansi. Madiun*
- Mardiasmo. (2009) *Akuntansi Sektor Publik*, Andi Yogyakarta, Yogyakarta Manullang. 2012. *Dasar-dasar Manajemen Bagi Pimpinan Perusahaan*. Jakarta : Gajah Mada Press.
- Muslimin. (2012). Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa Di Desa Punagaya Kecamatan Bangkala Kabupaten Jeneponto. *Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 2(1)
- Mulyadi. (2007) *Akuntansi Biaya*, Edisi 5, Yogyakarta : UPP STIM YKPN,
- Mulyadi. (2016). *Sistem Akuntansi Edisi 4*. Jakarta : Penerbit Salemba Empat.
- Minarti, Sri. (2011). *Manajemen Sekolah Mengelola Lembaga Pendidikan Secara Mandiri*. Yogyakarta: Ar-Ruzz Media.
- Periansya, & Sopiyan AR. (2020). Dampak kompetensi dan partisipasi masyarakat terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa kecamatan rambutan banyuasin. *Jurusan Akuntansi, Politeknik Negeri Sriwijaya*, 21.
- Pura, Rahman., & Sufiati. (2014). Implikasi Penerapan Internal Control Terhadap Pencegahan Fraud atas Pengelolaan Dana BOS. *Jurnal Ekonomi, Manajemen, dan Akuntansi*, 4(2) : 218-224
- Putri, H. P. A., AR, S., & Periansya. (2019). Pengaruh Kompetensi, Spi Dan Sap Terhadap Kualitas. *Jurnal Riset Terapan Akuntansi*, 3(2).

- Rahayuningsih, Sri. (2021). Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS). *Jurnal Nasional*.ump.ac.id/index.php/Alhamra/article/.
- Rozi Fadillah, Sulastini, Noor Hidayati, (2017). Pengaruh Kompetensi, Disiplin Kerja Dan Lingkungan Kerja Terhadap Kinerja Karyawan Pada Kantor Bank Kalsel Cabang Pembantu di Banjarmasin, *Jurnal Bisnis dan Pembangunan*.
- Sapartiningsih, D., Suharno, & Kristianto, D. (2018). Analisis Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia, Pemanfaatan Teknologi Informasi, Partisipasi Penganggaran dan Pengawasan terhadap AkuntabilitasPengelolaan Dana Desa. *Jurnal Akuntansi Dan Sistem Teknologi Informasi*, 14(1) : 100–114. <https://doi.org/10.1007/s11664-018-06850-8>